

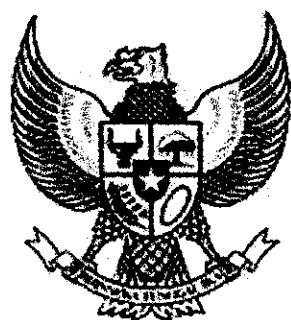
**PERUBAHAN RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
(RENJA OPD)**



**KECAMATAN MOJOGEDANG
TAHUN 2024**

Alamat : Jl. Tanjung Anom No. 1 Mojogedang
Telp. 0271 495591

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 35
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024



PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN MOJOGEDANG
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026, pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024.

Mojogedang, September 2024

CAMAT MOJOGEDANG



SUTRISNO, S.Sos

Pembina

NIP. 19670416 198903 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MOJOGEDANG TRIWULAN II TAHUN 2024	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawai Tahun 2024 Triwulan II (Semester I).	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojogedang.....	39
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mojogedang	39
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2024	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja.....	42
3.2 Program dan Kegiatan.....	43
3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD.....	52
3.4. Pagu Indikatif	53
BAB IV PENUTUP	
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	55
4.2 Kaidah Pelaksanaan.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Mojogedang tahun 2024	10
Tabel 2.2	Kesesuaian antara KPD dan Renja Kecamatan Mojogedang tahun 2024	21
Tabel 2.3	Kesesuaian Antara Renja dan APBD Kecamatan Mojogedang Tahun 2024	26
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran sampai dengan Bulan Juni 2024	31
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja(Capaian indicator) sampai Bulan Juni 2024	36
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan-Sasaran Kecamatan Mojogedang tahun 2024	43
Tabel 3.2	Perubahan Program,Kegiatan, subkegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2024	45
Tabel 3.3	Perbandingan Program, Kegiatan, Subkegiatan Dan Pagu Indikatif Renja, APBD dan Renja Perubahan tahun 2024	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Venn Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Antara Rentra dan Renja Tahun 2024	17
Gambar 2.2	Diagram venn Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Antara RKPD dengan Renja tahun 2024	19
Gambar 2.3	Diagram venn Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Antara APBD dan Renja Tahun 2024	29
Gambar 3.1	Skema (Flowchard) Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mojogedang tahun 2024	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Mojogedang untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun di Tahun 2024. Perubahan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pemangunan nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Karanganyar – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 162);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
28. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 16).

29. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 34);
30. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68).
31. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar adalah:

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan Kecamatan Mojogedang Tahun 2024.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi.

Tujuan:

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mojogedang;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Kecamatan Mojogedang;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPD);
4. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mojogedang, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Mojogedang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Mojogedang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mojogedang.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2024

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam subbab berikut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024 Triwulan II dan Capaian Renstra Kecamatan Mojogedang.

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Mojogedang tahun 2024 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojogedang

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Mojogedang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Mojogedang, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mojogedang

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Kecamatan Mojogedang untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2024

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MOJOGEDANG TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan di atasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024 Triwulan II (Semester I).

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026 dengan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Mojogedang untuk Tahun 2024, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2024. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
KESESUAIAN ANTARA RENJA DAN RENSTRA TAHUN 2024

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2024		KETERANGAN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	Rp.
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Mojogedang			2.500.430.000		2.019.080.811		481.349.189
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.500.430.000		2.019.080.811		481.349.189
7	1				KECAMATAN			2.500.430.000		2.019.080.811		481.349.189
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	2.400.000.000	100%	1.942.330.811	=	457.669.189
7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	11.000.000	100%	3.900.000	=	7.100.000
7	1	1	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	1.400.000	>	3.600.000
7	1	1	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6.000.000	2 Laporan	2.500.000	>	3.500.000
7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.375.000.000	100%	1.269.090.411	=	105.909.589
7	1	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/Bulan	1.375.000.000	12 Orang/bulan	1.269.090.411	<	105.909.589

7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	135.000.000	100%	74.558.000	=	60.442.000
7	1	1	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.000.000	10 Paket	5.500.000	<	1.500.000
7	1	1	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	10 Paket	3.938.000	>	11.062.000
7	1	1	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	10 Paket	9.900.000	>	5.100.000
7	1	1	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.000.000	20 Paket	6.600.000	<	1.400.000
7	1	1	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Paket	5.000.000	24 Dokumen	4.620.000	=	380.000
7	1	1	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket	80.000.000	50 Laporan	44.000.000	<	36.000.000
7	1	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000	0	-	>	5.000.000
7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	286.000.000	100%	28.000.000	=	258.000.000
7	1	1	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	56.000.000	1 Unit	-	=	56.000.000
7	1	1	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	1 Unit	28.000.000	=	2.000.000

7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	0	-	>	200.000.000
7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	506.000.000	100%	469.630.000	=	36.370.000
7	1	1	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			50 Laporan	1.320.000	<	(1.320.000)
7	1	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	26.000.000	50 Laporan	24.310.000	<	1.690.000
7	1	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	480.000.000	12 Laporan	444.000.000	=	36.000.000
7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	87.000.000	100%	97.152.400	=	(10.152.400)
7	1	1	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	33.000.000	5 Unit	32.872.400	=	127.600
7	1	1	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.000.000	10 Unit	3.080.000	<	(80.000)
7	1	1	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.000.000	2 Unit	1.000.000	=	-
7	1	1	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	1 Unit	60.200.000	=	(10.200.000)

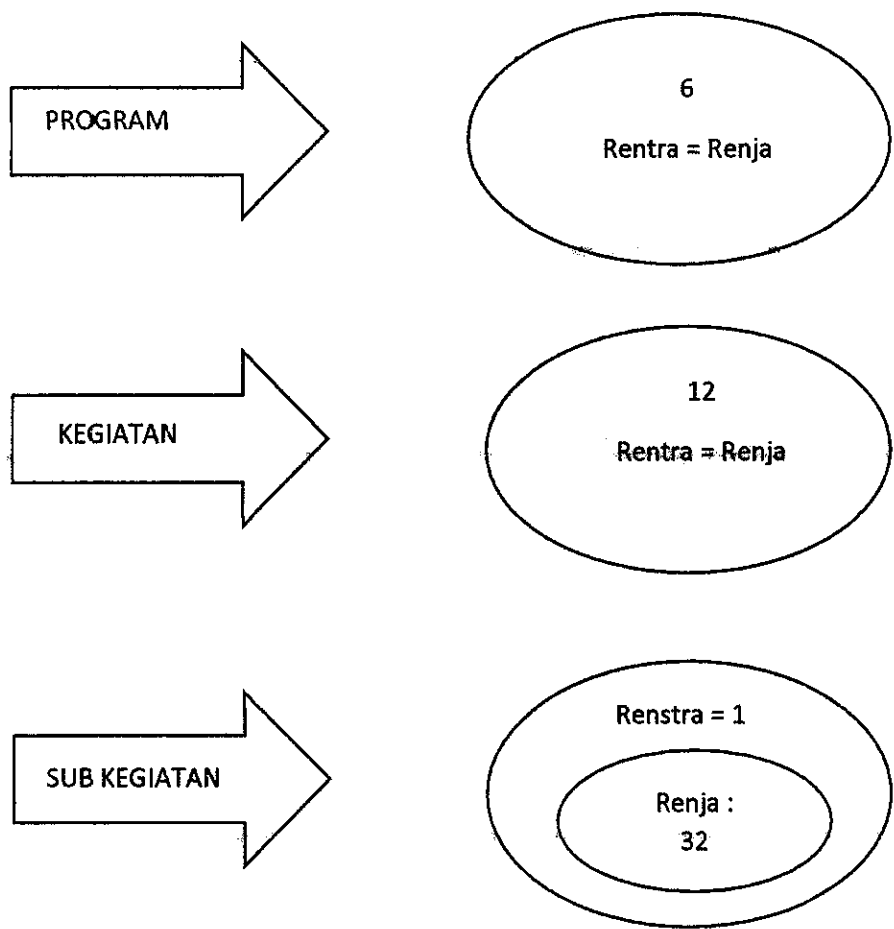
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	8.140.000	84	1.500.000	=	6.640.000
7	1	2	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	8.140.000	100%	1.500.000	=	6.640.000
7	1	2	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	3.000.000	12 Laporan	1.000.000	<	2.000.000
7	1	2	2,02	0'3'	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	5.140.000	2 Laporan	500.000	=	4.640.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	98%	16.500.000	98%	12.800.000	=	3.700.000
7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	7.700.000	100%	4.000.000	=	3.700.000
7	1	3	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga	5.500.000	20 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000	<	3.500.000
7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.200.000	20 Laporan	2.000.000	<	200.000

7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	8.800.000	100%	8.800.000	=	-
7	1	3	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	13 Lembaga	8.800.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	8.800.000	>	-
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa Dalam Keadaan Kondusif	98%	37.950.000	98%	37.950.000	=	-
7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	37.950.000	12 Laporan	37.950.000	=	-
7	1	4	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	37.950.000	12 Laporan	37.950.000	=	-
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan	100%	15.950.000	100%	8.000.000	=	7.950.000
7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	15.950.000	100%	8.000.000	=	7.950.000
7	1	5	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang	8.000.000	12 Orang	5.000.000	>	3.000.000

7	1	5	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40 Orang	7.950.000	10 Orang	3.000.000	>	4.950.000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan	100%	21.890.000	100%	16.500.000	=	5.390.000
7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	21.890.000	100%	16.500.000	=	5.390.000
7	1	6	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Dokumen	4.500.000	10 Dokumen	4.950.000	>	(450.000)
7	1	6	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	4.500.000	10 Dokumen	4.950.000	>	(450.000)
7	1	6	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	6.600.000	10 Dokumen	6.600.000	>	-
7	1	6	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13 Dokumen	3.500.000		-	>	3.500.000

7	1	6	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					-	-
7	1	6	2,01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen	2.790.000			>	2.790.000

Secara singkat digambarkan dalam diagam venn berikut ini :



Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

- 1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
- Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
 - Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
 - Subkegiatan konsistensi sebesar : $(32/33) \times 100\% = 96,96\%$, terdapat 2 kegiatan dalam Renstra yang tidak masuk dalam Renja yaitu :
 1. Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD, rencana dilaksanakan pada saat Perubahan APBD
 2. Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa : pelaksanaanya diundur tahun 2027.

Dan sebaliknya ada sub kegiatan yang ada dalam Renja namun tidak ada dalam Renstra yaitu Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada, oleh karena itu Renja belum 100 % sesuai dengan Renstra sehingga perlu perbaikan dalam penyusunan Perubahan Renja.

2) Kesesuaian indikator dan target

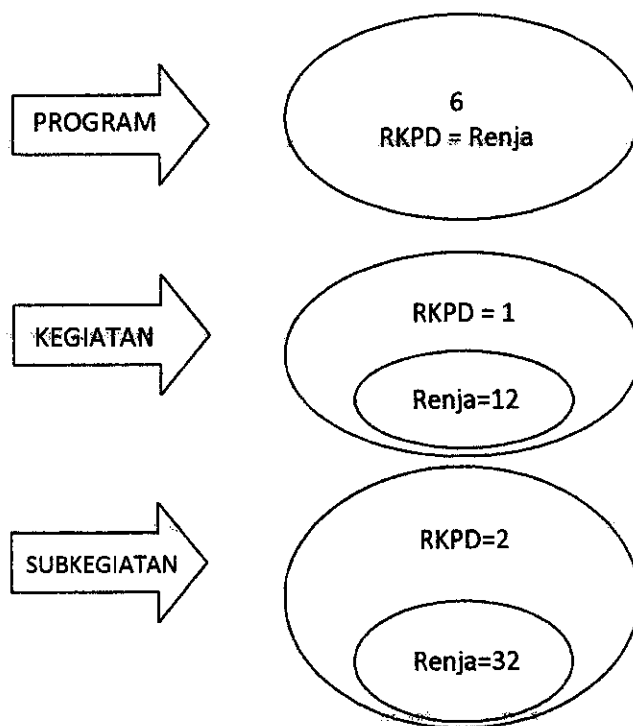
- Terdapat perbedaan target Renja lebih besar dari target Renstra atau sebaliknya Renja lebih kecil dari Renstra.

3) Kesesuaian alokasi anggaran

- Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp.2.019.080.811.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp.2.500.430.- Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Kecamatan Mojogedang;
- Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN =Rp.105.909.589,-.

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2024 dengan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Mojogedang untuk Tahun 2024, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2024. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Mojogedang dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2024. Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :



Gambar : 2.2
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

- Program konsistensi sebesar 100% (6 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
- Kegiatan konsistensi sebesar $(12/13) \times 100 \% = 92,30 \%$ (Kegiatan dalam Renja semua terdapat dalam RKPD, namun terdapat 1 kegiatan dalam Renja yang tidak ada/belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan Renja 100 % sesuai dengan RKPD, karena semua kegiatannya terdapat dalam RKPD. Kegiatan dalam RKPD yang tidak terdapat dalam Renja 2024 adalah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah karena menyesuaikan alokasi anggaran dan rencana akan dilaksanakan pada saat Perubahan APBD
- Subkegiatan konsistensi sebesar $(32/34) \times 100\% = 94,11 \%$ (Sub Kegiatan dalam Renja semua terdapat dalam RKPD, namun terdapat 2 sub kegiatan dalam Renja yang tidak ada /belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan Renja 100 % sesuai dengan RKPD, karena semua sub kegiatannya terdapat dalam

RKPD. 2 sub kegiatan dalam RKPD yang tidak terdapat dalam Renja 2024 adalah

- a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
- b. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

2. Kesesuaian Indikator dan target

- Terdapat perbedaan target RKPD lebih besar dari target Renja sehingga perlu perbaikan sesuai dengan capaian /kondisi riil.

3. Kesesuaian alokasi anggaran

- Pagu indikatif antara Renja dengan RKPD sama yaitu sebesar Rp. 2.019.080.811.-

Tabel 2.2

KESESUAIAN ANTARA RKPD 2024 DAN RENJA KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2024

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN					RKPD		RENJA		KETERANGAN	
															TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET	Rp.
1					2					3					4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Mojogedang							2.019.080.811		2.019.080.811						
7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.019.080.811		2.019.080.811						
7	1				KECAMATAN							2.019.080.811		2.019.080.811						
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	1.942.330.811	100%	1.942.330.811	=		-			
7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.900.000	100%	3.900.000	=		-			
7	1	1	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.400.000	2 Dokumen	1.400.000	=		-			
7	1	1	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.500.000	2 Laporan	2.500.000	=		-			
7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.269.090.411	100%	1.269.090.411	=		-			
7	1	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	1.269.090.411	12 Orang/bulan	1.269.090.411	=		-			
7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah	0	-	0	-	=		-			
7	1	1	2,05		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	0	-	=		-			
7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	74.558.000	100%	74.558.000	=		-			

7	1	1	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.500.000	10 Paket	5.500.000	=	-
7	1	1	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3.938.000	10 Paket	3.938.000	=	-
7	1	1	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	9.900.000	10 Paket	9.900.000	=	-
7	1	1	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	6.600.000	20 Paket	6.600.000	=	-
7	1	1	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	24 Paket	4.620.000	24 Dokumen	4.620.000	=	-
7	1	1	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Paket	44.000.000	50 Laporan	44.000.000	=	-
7	1	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0	-		-
7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	28.000.000	100%	28.000.000	=	-
7	1	1	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0%	-		-	=	-
7	1	1	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	-	=	-
7	1	1	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	28.000.000	1 Unit	28.000.000	=	-
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0	-		-
7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	469.630.000	100%	469.630.000	=	-
7	1	1	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	1.320.000	50 Laporan	1.320.000	=	-
7	1	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50 Laporan	24.310.000	50 Laporan	24.310.000	=	-

7	1	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	444.000.000	12 Laporan	444.000.000	=	-
7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	97.152.400	100%	97.152.400	=	-
7	1	1	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	32.872.400	5 Unit	32.872.400	=	-
7	1	1	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3.080.000	10 Unit	3.080.000	=	-
7	1	1	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.000.000	2 Unit	1.000.000	=	-
7	1	1	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.200.000	1 Unit	60.200.000	=	-
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	1.500.000	84	1.500.000	=	-
7	1	2	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	1.500.000	100%	1.500.000	=	-
7	1	2	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	<	-
7	1	2	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	500.000	2 Laporan	500.000	=	-
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	98%	12.800.000	98%	12.800.000	=	-
7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	4.000.000	100%	4.000.000	=	-

7	1	3	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakan	2.000.000	20 Lembaga Kemasyarakan	2.000.000	=	-
7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	2.000.000	20 Laporan	2.000.000	=	-
7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	8.800.000	100%	8.800.000	=	-
7	1	3	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	13 Lembaga	8.800.000	5 Lembaga Kemasyarakan	8.800.000	=	-
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa Dalam Keadaan Kondusif	98%	37.950.000	98%	37.950.000	=	-
7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	37.950.000	12 Laporan	37.950.000	=	-
7	1	4	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	37.950.000	12 Laporan	37.950.000	=	-
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan	100%	8.000.000	100%	8.000.000	=	-
7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	8.000.000	100%	8.000.000	=	-
7	1	5	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang	5.000.000	12 Orang	5.000.000	=	-

7	1	5	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40 Orang	3.000.000	10 Orang	3.000.000	=	-
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan	100%	16.500.000	100%	16.500.000	=	-
7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	16.500.000	100%	16.500.000	=	-
7	1	6	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	4.950.000	10 Dokumen	4.950.000	=	-
7	1	6	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	4.950.000	10 Dokumen	4.950.000	=	-
7	1	6	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	6.600.000	10 Dokumen	6.600.000	=	-
7	1	6	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				-		-
7	1	6	2,01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						-

2.1.3. Hubungan antara Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Mojogedang untuk Renja Tahun 2024, yaitu terhadap APBD Tahun 2024. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024. Hasil evaluasi dapat diketahui kn kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Mojogedang dengan pagu APBD Tahun 2024. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

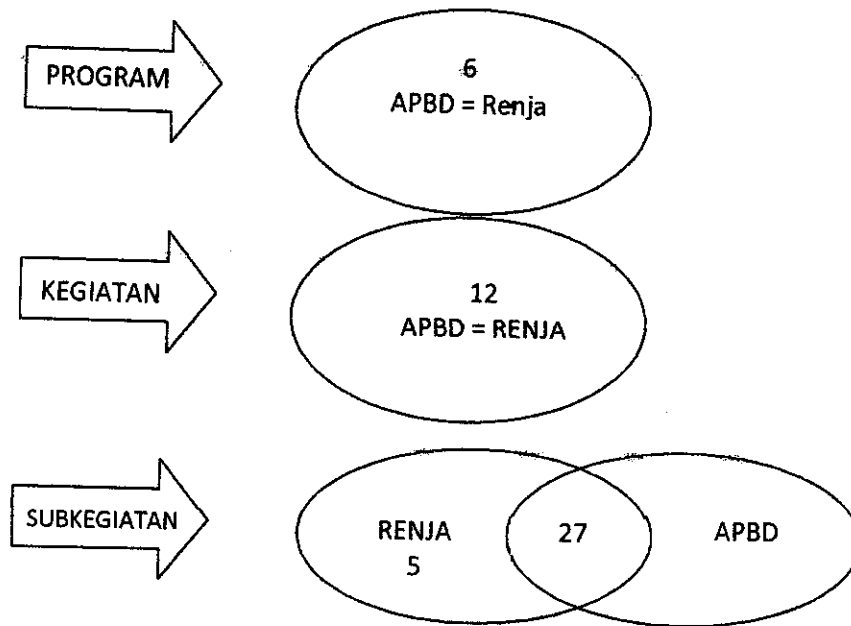
TABEL 2.3
KESUAIAN ANTARA RENJA DAN APBD 2024 KECAMATAN MOJOGEDANG

NO						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	KETERANGAN
							PAGU INDIKATIF	PAGU	%
1						2	3	4	5
						Kecamatan Mojogedang	2.019.080.811	2.067.922.379	102,42
7						UNSUR KEWILAYAHAN	2.019.080.811	2.067.922.379	97,64
7	1					KECAMATAN	2.019.080.811	2.067.922.379	97,64
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.942.330.811	1.940.672.379	100,09
7	1	1	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.900.000	3.900.000	100,00
7	1	1	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.400.000	1.400.000	100,00
7	1	1	2,01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100,00
7	1	1	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.269.090.411	1.286.731.979	98,63
7	1	1	2,02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.269.090.411	1.286.731.979	98,63
7	1	1	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.558.000	71.573.400	104,17
7	1	1	2,06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000	5.500.000	100,00
7	1	1	2,06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.938.000	8.333.400	47,26
7	1	1	2,06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.900.000	9.900.000	100,00

7	1	1	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.600.000	5.000.000	132,00
7	1	1	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.620.000	3.840.000	120,31
7	1	1	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.000.000	39.000.000	112,82
7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.000.000	43.000.000	65,12
7	1	1	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	43.000.000	-
7	1	1	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	28.000.000	-	#DIV/0!
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	#DIV/0!
7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.630.000	498.000.000	94,30
7	1	1	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.320.000	-	#DIV/0!
7	1	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.310.000	22.800.000	106,62
7	1	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	444.000.000	475.200.000	93,43
7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.152.400	37.467.000	259,30
7	1	1	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.872.400	33.392.000	98,44
7	1	1	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.080.000	4.075.000	75,58
7	1	1	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.000.000	-	#DIV/0!
7	1	1	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.200.000	-	#DIV/0!
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.500.000	2.000.000	75,00
7	1	2	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.500.000	2.000.000	75,00
7	1	2	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.000.000	1.000.000	100,00
7	1	2	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	500.000	1.000.000	50,00
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.800.000	17.800.000	71,91

7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.000.000	9.000.000	44,44
7	1	3	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.000.000	7.000.000	28,57
7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.000.000	2.000.000	100,00
7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	8.800.000	8.800.000	100,00
7	1	3	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	8.800.000	8.800.000	100,00
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	37.950.000	34.625.000	109,60
7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.950.000	34.625.000	109,60
7	1	4	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	37.950.000	34.625.000	109,60
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.000.000	54.000.000	14,81
7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.000.000	54.000.000	14,81
7	1	5	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5.000.000	50.000.000	10,00
7	1	5	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3.000.000	4.000.000	75,00
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.500.000	18.825.000	87,65
7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.500.000	18.825.000	87,65
7	1	6	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.950.000	4.950.000	100,00
7	1	6	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.950.000	4.950.000	100,00
7	1	6	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.600.000	5.600.000	117,86
7	1	6	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	1.600.000	-
7	1	6	2,01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	1.725.000	-

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :



Gambar 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2024 dengan Renja Tahun 2024

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

- konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
- Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
- Konsistensi Subkegiatan sebesar : $(27/32) \times 100\% = 84,37\%$; terdapat 5 Sub kegiatan dalam Renja yang tidak ada dalam APBD yaitu :
 - a. Pengadaan Aset Tetap Lainnya, akan dilaksanakan pada perubahan APBD
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, akan dilaksanakan pada anggaran tahun berikutnya
 - c. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sudah tidak dianggarkan lagi
 - d. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, karena alokasi anggaran yang terbatas

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, karena alokasi anggaran yang terbatas

2. Kesesuaian indikator dan target

Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan

3. Kesesuaian alokasi anggaran

- Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 2.019.080.811,-, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.067.922.379,- ada kenaikan sebesar Rp. 48.841.568.- atau (2,41%);

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Mojogedang Tahun 2024

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024 sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2024 Kecamatan Mojogedang melaksanakan 6 program dengan 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 2.067.922.379,-. Sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 2.4

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN S/D BULAN JUNI 2024

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		CAPAIAN FISIK (%)
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kecamatan Mojogedang			2.067.922.379	1.058.786.663	51,20	50
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.067.922.379	1.058.786.663	51,20	50
7	1				KECAMATAN			2.067.922.379	1.058.786.663	51,20	50
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	1.940.672.379	1.026.591.013	52,90	50
7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.900.000	3.202.100	82,11	50
7	1	1	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.400.000	1.125.000	80,36	50
7	1	1	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.500.000	2.077.100	83,08	50
7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.286.731.979	740.480.737	57,55	50
7	1	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	1.286.731.979	740.480.737	57,55	50
7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	71.573.400	31.471.000	43,97	50
7	1	1	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.500.000	983.000	17,87	50

7	1	1	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	8.333.400	4.221.800	50,66	50
7	1	1	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	9.900.000	3.625.000	36,62	50
7	1	1	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	5.000.000	976.200	19,52	50
7	1	1	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Paket	3.840.000	1.920.000	50,00	50
7	1	1	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Paket	39.000.000	19.745.000	50,63	50
7	1	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	-		
7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	43.000.000	40.200.000	93,49	50
7	1	1	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	43.000.000	40.200.000	93,49	50
7	1	1	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		-			
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-		
7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	498.000.000	199.292.176	40,02	50
7	1	1	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-			
7	1	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50 Laporan	22.800.000	9.812.176	43,04	50
7	1	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	475.200.000	189.480.000	39,87	50

7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	37.467.000	11.945.000	31,88	50
7	1	1	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	33.392.000	10.995.000	32,93	50
7	1	1	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.075.000	950.000	23,31	50
7	1	1	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		-			
7	1	1	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-			
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	2.000.000	541.150	27,06	50
7	1	2	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	2.000.000	541.150	27,06	50
7	1	2	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.000.000	541.150	54,12	50
7	1	2	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1.000.000	-	-	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	98%	17.800.000	10.904.250	61,26	50
7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	9.000.000	7.380.000	82,00	50
7	1	3	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga	7.000.000	6.995.000	99,93	50

7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	2.000.000	385.000	19,25	50
7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	8.800.000	3.524.250	40,05	50
7	1	3	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga	8.800.000	3.524.250	40,05	50
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa Dalam Keadaan Kondusif	98%	34.625.000	16.425.000	47,44	50
7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	34.625.000	16.425.000	47,44	50
7	1	4	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	34.625.000	16.425.000	47,44	50
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan	100%	54.000.000	930.000	1,72	50
7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	54.000.000	930.000	1,72	50
7	1	5	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	12 Orang	50.000.000	450.000	0,90	50
7	1	5	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10 Orang	4.000.000	480.000	12,00	50
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan	100%	18.825.000	3.395.250	18,04	50
7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi	100%	18.825.000	3.395.250	18,04	50

						Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
7	1	6	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	4.950.000	540.300	10,92	50	
7	1	6	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	4.950.000	2.329.950	47,07	50	
7	1	6	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	5.600.000	525.000	9,38	50	
7	1	6	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	1.600.000	-	-		
7	1	6	2,01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Dokumen	1.725.000	-	-		

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di tahun 2024 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.058.786.663 atau 51,20 % dengan realisasi fisik sebesar 51,20 %.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel :

TABEL 2.5
REALISASI KINERJA (CAPAIAN INDIKATOR) S.D BULAN JUNI 2024

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD TARGET KINERJA	CAPAIAN FISIK (%) Bukti Dukung
1					2	3	4	8
					Kecamatan Mojogedang			
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	1				KECAMATAN			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	50
7	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	50
7	1	1	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1. Renja 2025 2. Renja Perub 2024
7	1	1	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	CALK, LPT
7	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	50
7	1	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	Gaji dan TPP 11 orang selama 6 bulan dan THR th 2024
7	1	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	50
7	1	1	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5 Paket
7	1	1	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5 Paket
7	1	1	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	5 Paket
7	1	1	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	10 Paket
7	1	1	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	24 Paket	12 Paket

7	1	1	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Paket	6 Paket
7	1	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Dilaksanakan di Perubahan
7	1	1	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	90
7	1	1	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	9 Unit
7	1	1	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Belum ada alokasi dana
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Belum ada alokasi dana
7	1	1	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50 %
7	1	1	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Pergeseran
7	1	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50 Laporan	24 Laporan
7	1	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan
7	1	1	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50 %
7	1	1	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit dari bulan Januasri s/d Juni
7	1	1	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4 Unit
7	1	1	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Belum ada alokasi dana
7	1	1	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Belum ada alokasi dana
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	
7	1	2	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	50 %
7	1	2	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6 Laporan

7	1	2	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1 Laporan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	98%	
7	1	3	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	70 %
7	1	3	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga	13 Lembaga
7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	6 Laporan
7	1	3	2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100 %
7	1	3	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga	1 Lembaga
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa Dalam Keadaan Kondusif	98%	
7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	6 Laporan
7	1	4	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6 Laporan
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan	100%	50 %
7	1	5	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	50 %
7	1	5	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	12 Orang	70 Orang
7	1	5	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10 Orang	50 ORANG
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan	100%	50 %
7	1	6	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	50 %

7	1	6	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	13 Dokumen
7	1	6	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	13 Dokumen
7	1	6	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	13 Dokumen
7	1	6	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	13 Dokumen
7	1	6	2,01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Dokumen	1 Dokumen

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Mojogedang

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Mojogedang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Mojogedang, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Mojogedang terlihat adanya :

- Konsisten dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu Renja yaitu : Rp. 2.019.080.811.- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.067.922.379,- ada kenaikan sebesar 2,41 %;
- Sampai semester I realisasi anggaran mencapai 51,20 %;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mojogedang

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mojogedang, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mojogedang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2024

merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026. Sedangkan RPD Tahun 2024 – 2026 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2024 – 2026.

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur pemerintahan dengan kompetensi yang tidak merata
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.
5. Belum optimalnya Sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum
6. Belum optimalnya toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta pembedakan politik masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Mojogedang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Belum optimalnya sistem kearsipan di Kecamatan

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;

- e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
- b. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
- c. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

6. Seksi Pelayanan Umum

- a. Belum optimalnya Pelayanan Umum yang diberikan kepada Masyarakat
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024, pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Mojogedang diuraikan pada Bab III.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MOJOGEDANG

TAHUN 2024

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Mojogedang diuraikan pada Bab III.

Beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur pemerintahan dengan kompetensi yang tidak merata
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.
5. Belum optimalnya Sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum.
6. Belum optimalnya toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta pembedakan politik masyarakat.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2024 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2024, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indikator dan targetnya.

Tabel 3.1
Perubahan Target Indikator Tujuan - Sasaran Kecamatan Mojogedang
Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun Anggaran 2024		Keterangan
				sebelum	Sesudah	
I	Kecamatan Mojogedang					
1	Tujuan :					
	1 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	72	72	=
	2 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	%	8,52	8,52	=
2	Sasaran :					
	1 Meningkatkan Kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	72	72	=
	2 Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,78	0,78	=

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2024, tersebut diatas. Kecamatan Mojogedang pada tahun 2024 sebagai Unsur Kewilayahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada sasaran 1 dan sasaran 4 daerah yaitu Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan social dan Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 6 program, 12 Kegiatan dan 30 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2024.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Kecamatan Mojogedang maka perlu

dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Mojogedang di tahun 2024 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel 3.2 berikut :

TABEL 3.2
PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2024

NO					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
							TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	Rp	%
1					2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5
					Kecamatan Mojogedang			2.067.922.379		2.323.879.483	255.957.104,00	0,12
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.067.922.379		2.323.879.483	255.957.104,00	0,12
7	1				KECAMATAN			2.067.922.379		2.323.879.483	255.957.104,00	0,12
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	1.940.672.379	100%	2.196.629.483	255.957.104,00	0,13
7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.900.000	100%	3.900.000	-	-
7	1	1	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.400.000	5 Dokumen	1.400.000	-	-
7	1	1	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.500.000	3 Laporan	2.500.000	-	-
7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.286.731.979	100%	1.492.689.083	205.957.104,00	0,16
7	1	1	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	1.286.731.979	12 Orang/bulan	1.492.689.083	205.957.104,00	0,16
7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Daerah			100%	25.900.000	25.900.000,00	

7	1	1	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			37 Orang	25.900.000	25.900.000,00	
7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	71.573.400	100%	73.494.000	1.920.600,00	0,03
7	1	1	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.500.000	12 Paket	5.500.000	-	-
7	1	1	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	8.333.400	12 Paket	8.333.400	-	-
7	1	1	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	9.900.000	10 Paket	9.900.000	-	-
7	1	1	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	5.000.000	12 Paket	5.070.600	70.600,00	0,01
7	1	1	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Paket	3.840.000	24 Dokumen	3.840.000	-	-
7	1	1	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	39.000.000	12 Laporan	39.850.000	850.000,00	0,02
7	1	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			12 Laporan	1.000.000	1.000.000,00	
7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	43.000.000	100%	75.362.500	32.362.500,00	0,75

7	1	1	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Unit	6.250.000	6.250.000,00	
7	1	1	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	43.000.000	11 Unit	53.162.500	10.162.500,00	0,24
7	1	1	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		-	8 Unit	15.950.000	15.950.000,00	
7	1	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	0	-	-	
7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	498.000.000	100%	484.720.000	(13.280.000,00)	(0,03)
7	1	1	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-		-	-	
7	1	1	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50 Laporan	22.800.000	48 Laporan	22.800.000	-	-
7	1	1	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	475.200.000	12 Laporan	461.920.000	(13.280.000,00)	(0,03)
7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	37.467.000	100%	40.563.900	3.096.900,00	0,08
7	1	1	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	33.392.000	5 Unit	36.488.900	3.096.900,00	0,09

7	1	1	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.075.000	10 Unit	4.075.000	-	-
7	1	1	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		-			-	-
7	1	1	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-			-	-
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	2.000.000	84	2.000.000	-	-
7	1	2	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	2.000.000	100%	2.000.000	-	-
7	1	2	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	-	-
7	1	2	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	1.000.000	-	-
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	98%	17.800.000	98%	17.800.000	-	-
7	1	3	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	9.000.000	100%	9.000.000	-	-

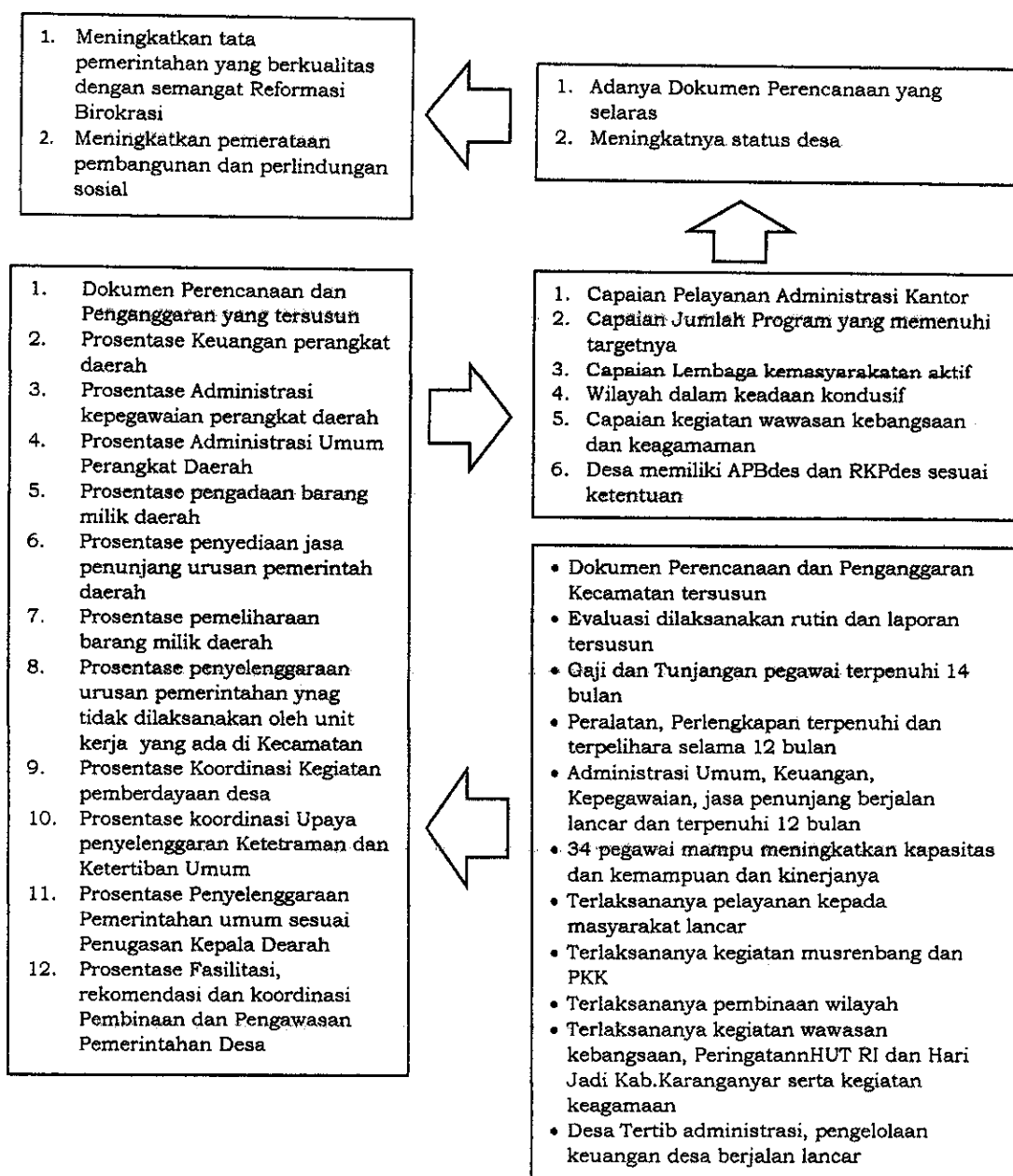
7	1	3	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000	13 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000	-	-
7	1	3	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	-	-
7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	8.800.000	100%	8.800.000	-	-
7	1	3	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	8.800.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.800.000	-	-
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa Dalam Keadaan Kondusif	98%	34.625.000	98%	34.625.000	-	-
7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	34.625.000	12 Laporan	34.625.000	-	-
7	1	4	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	34.625.000	12 Laporan	34.625.000	-	-
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan	100%	54.000.000	100%	54.000.000	-	-

7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	54.000.000	100%	54.000.000	-	-
7	1	5	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	12 Orang	50.000.000	70 Orang	50.000.000	-	-
7	1	5	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10 Orang	4.000.000	60 Orang	4.000.000	-	-
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan	100%	18.825.000	100%	18.825.000	-	-
7	1	6	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	18.825.000	100%	18.825.000	-	-
7	1	6	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	4.950.000	13 Dokumen	4.950.000	-	-
7	1	6	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	4.950.000	13 Dokumen	4.950.000	-	-

7	1	6	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difaasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	5.600.000	13 Dokumen	5.600.000	-	-
7	1	6	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Dokumen	1.600.000	13 Dokumen	1.600.000	-	-
7	1	6	2,01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Dokumen	1.725.000	2 Dokumen	1.725.000	-	-

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD. Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Mojogedang, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mojogedang, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar 3.1
Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran
Kecamatan Mojogedang Tahun 2024

Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2024, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3
Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2024

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	12	12	13
3	Sub Kegiatan	32	27	31
4	Jumlah Dana	2.019.080.811	2.067.922.379	2.323.879.483

Perubahan Renja 2024 direncanakan :

- 1) Ada penambahan 1 kegiatan yaitu : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, berupa aktivitas peningkatan kapasitas aparatur (Capacity buildings) luar daerah di jawa tengah/DIY, dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.900.000,- yang melibatkan lebih kurang 37 orang terdiri ASN dan Non ASN;
- 2) Ada penambahan dana sebesar Rp. 255.957.104,- yang terutama karena penambahan :
 - a. Subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Rp. 205.957.104,- untuk mencukupi kebutuhan selama 14 kali pembayaran;
 - b. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, sebesar Rp. 25.900.000,-
 - c. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 70.600,-

- d. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 850.000,-
 - e. Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp. 1.000.000,-
 - f. Subkegiatan Pengadaan Mebel Rp. 6.250.000,-
 - g. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 10.162.500,-
 - h. Subkegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya Rp. 15.950.000,-
 - i. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 3.096.900,-
- 3) Juga dilakukan pegeseran anggaran pada subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 13.280.000,- untuk penyesuaian pemenuhan kebutuhan riil dan agar penggunaan anggaran lebih efektif.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2024.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kecamatan Mojogedang. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Mojogedang, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
- 2) Perubahan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024;
- 3) Perubahan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai

Kecamatan Mojogedang, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;

- 4) Perubahan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
- 5) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2024 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten.

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI



Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	
2. Kepala BAPERLITBANG	
3. Sekretaris BAPERLITBANG	
4. Kepala Bidang Sosial Budaya BAPERLITBANG	